

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG



RENCANA KERJA

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2019



KECAMATAN LALABATA

Jln. Pemuda No. Watansoppeng
Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA

Jln. Pemuda No. Watansoppeng Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811

KEPUTUSAN
CAMAT LALABATA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : / KPTS /LBT / VIII / 2019

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LALABATA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT LALABATA KABUPATEN SOPPENG

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lalabata perlu disusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Lalabata.
 - b. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Soppeng Tahun 2018.
 - c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lalabata.
 - d. bahwa rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2018.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019 dengan keputusan Camat Lalabata.
- Menimbang
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
-

undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
-

Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN CAMAT LALABATA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019**

Pasal 1.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Lalabata adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019.

Pasal 2.

Perubahan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lalabata ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : Agustus 2019

CAMAT LALABATA KAB. SOPPENG,

ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19791102 199810 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN LALABATA

Jln. Pemuda Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811

KEPUTUSAN CAMAT LALABATA NOMOR : 45 /KPTS-LBT/VII/2019

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019

CAMAT LALABATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021, maka diperlukan Rencana Kerja Perubahan Tahunan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Tahunan 2019 berfungsi sebagai acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Lalabata untuk tahun 2019;
 - c. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019;
 - d. bahwa agar Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagaimana huruf a, b dan c tersebut dapat bekerja dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Lalabata;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Lalabata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 di maksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019
 2. Mereview Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun sebelumnya;
 3. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 kepada Camat Lalabata;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Keputusan in idisampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

CAMAT LALABATA

ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19791102 199810 2 001

Lampiran Keputusan Camat Lalabata
Nomor : 45 /KPTS-LBT/VII/2019
Tanggal : 31 Juli 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019
KECAMATAN LALABATA**

No	Jabatan Dalam Tim	N a m a	Jabatan Unit Kerja
1.	Penasehat	ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si	Camat Lalabata
2.	Pengarah	IRFAN SANJAYA, S.STP, M.Si	Sekcam Lalabata
3.	Ketua	HASRI, SE	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan & Keuangan
4.	Anggota	PATMAWATI, S.Sos RUDIANTO, SE RUTDAMAYANTI, SE FAJAR WERE BATARA TUNGKE, SE IRFAN, A.Md	Kasi Kesra Kasi PMD Kasubag. Umum & Kepegawaian Staf Perencanaan & Keuangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

CAMAT LALABATA

ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19791102 199810 2 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 merupakan tahun ketiga periode 2016-2021 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN 2019) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategi Kecamatan Lalabata, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Lalabata tahun 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan tahun 2019 ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata	21
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.....	32

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
3.1.	Indikator Kinerja.....	33
3.2.	Kelompok Sasaran	34
3.3.	Lokasi Kegiatan	34
3.4.	Pagu Sebelum Perubahan dan Pagu Sesudah Perubahan.....	34
3.5.	Sumber Dana	34
BAB VI	P E N U T U P	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra	14
Tabel 2.2	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.....	26
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program / Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan ada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat berama pemerintah daerah secara berencana, bertahap, dan berkeinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama di barengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkkn potensi yag dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kecamatan Lalabata selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah berkewajiban menyusun rencana kerja perubahan 2019 (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalm sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan bagi unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan;
3. Urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan Tahun n+1

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RPKD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah di Undang-Undang No.9 Tahun 2015;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun vs2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kecamatan Lalabata guna memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lalabata agar lebih terarah dan terjamin tercapainya.

Renja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja organisasi.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (*Out come*).
4. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Kantor Kecamatan Lalabata

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota,serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

3.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

4.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

5.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LALABATA TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lalabata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Indikator Kinerja

Berisikan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan lalabata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten soppeng.

3.2 Kelompok Sasaran

Berisikan Kelompok dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Lokasi Kegiatan

Berisikan Lokasi Kegiatan yang dilaksanakan di kantor kecamatan lalabata.

3.4 Pagu Sebelum Perubahan dan Pagu Setelah Perubahan

Berisikan Pagu Sebelum Perubahan dan Pagu Setelah Perubahan

3.5 Sumber dana

Berisikan Sumber dana yang pakai pada kantor kecamatan lalabata

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Pada tahun 2019 Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 dan 14 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kecamatan Lalabata yang dianggarkan sebesar Rp 9.871.786.994,- dan terealisasi sebesar Rp.2.894.229.883,- atau 54.16%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 4.528.088.780,- dan terealisasi sebesar Rp.347.940.827,- atau 7.68% rata-rata belum memenuhi target pada triwulan ke II :

a) Program Pelayanan Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.72.592.800,- dan terealisasi sebesar Rp.9.738.757,- sisa anggaran Rp.35.116.436,- atau 13,24% Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.1000.000,- atau 0%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa 2 STNK kendaraan roda empat dan 6 STNK kendaraan roda dua.
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.24.822.200,- dan terealisasi sebesar Rp.4.402.500,- sisa anggaran Rp.20.419.700,-

atau 17,74%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.-, sisa anggaran Rp.2.500.000,- atau 0%. Kegiatan ini untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dianggarkan sebesar Rp.8.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.040.000,- sisa anggaran Rp.6.640.000,- atau 23,5%. kegiatan ini berupa isian tabung gas selama satu tahun anggaran.
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.150.618.720,- dan terealisasi sebesar Rp.48.340.000,- sisa anggaran Rp.102.278.720,- atau 32,09%. Kegiatan ini untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk satu tahun anggaran.
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.599.248.179,- dan terealisasi sebesar Rp.162.191.850,- sisa anggaran Rp.437.056.329,- atau 27,07%. Kegiatan ini untuk jenis kebutuhan kantor dan honorarium aparat untuk satu tahun anggaran

b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.152.667.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.236.920,- sisa anggaran Rp.112.430.080,- atau 26,36%. Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun anggaran .
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.59.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.000.000,- sisa anggaran Rp.28.560.000,-

- atau 52,05%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun anggaran.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.91.297.090,- dan terealisasi sebesar Rp.6.233.800,- sisa anggaran Rp.85.063.290,- atau 6,828%. kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan yang terdiri dari dua unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.22.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.220.000,- sisa anggaran Rp.19.750.000,- atau 14.02%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- c) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.23.528.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.187.000,- sisa anggaran Rp. 7.341.000 atau 68,8%. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis peraturan perundang-undangan selama satu tahun anggaran
- d) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.600.000,- sisa anggaran Rp.10.800.000,- atau 25%. Kegiatan ini berupa pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan
- e) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Kegiatan Bupati Menyapa dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.19.500.000,- sisa anggaran Rp.30.500.000,- atau 39% kegiatan ini berupa kegiatan buka puasa bersama penduduk dan pemerintah kabupaten Soppeng di bulan ramadhan.

- Penyuluhan Kamtibmas dengan anggaran sebesar Rp.12.110.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.12.110.000,- atau 0% kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan kamtibmas.
- f) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan
- Fasilitasi pendampingan pengelolaan Dana ADD di Desa yang dianggarkan sebesar Rp.6.700.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.6.700.000,- atau 0% kegiatan ini berupa mendampingi pengelolaan Dana ADD di Desa se kecamatan Lalabata
 - Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara yang dianggarkan sebesar Rp.543.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.543.600.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa jumlah guru mengaji 191 orang, imam mesjid kelurahan 68 orang, imam mesjid agung 4 orang, pendeta 10 orang selama satu tahun anggaran.
 - Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang dianggarkan sebesar Rp.252.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp0,- sisa anggaran Rp.252.600.000,- atau 0%.
 - Fasilitasi Kader Posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.193.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 193.500.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa terwujudnya fasilitasi kader posyandu selama satu tahun anggaran
 - Fasilitasi Kecamatan Sehat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 15.000.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa terwujudnya kecamatan sehat selama satu tahun anggaran 2019
- g) Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan
- Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 1.484.961.745,- terelisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini baru di semua kelurahan

- Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.648.528.022,- terelisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. kegiatan ini baru disemua kelurahan.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.205.024 terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini baru disemua kelurahan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD			
					Target Renja SKPD (2019)	Realisasi Renja SKPD (2019)	Tingkat Realisasi (%)		s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung jawab	
									Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
01	4427	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	-	0	0	0	150 buah	150 buah	100%	Kecamatan Lalabata

			Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana								
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	-	0	0	0	1 unit	1 unit	50%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	-	8 unit	5 unit	63%	15 unit	20 unit	100%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	20 unit	-	19 unit	7 unit	37%	10 unit	17 unit	85%
			Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	20 unit	-	7 unit	5 unit	71%	15 unit	20 unit	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	-	Gedung- Halaman 170m2	Gedung - Halama n 170m2	Gedung- Halama n 170m2	Gedung- Halaman 170m2	Gedung- Halaman 170m2	Gedung- Halaman 170m2

			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4=2 unit, Roda 2=26 unit	10 unit	36%	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 28 unit	40 unit	111%	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	-	50 unit	1 unit	2%	50 unit	51 unit	102%	
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu									
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 26 unit	10 unit	36%	8 unit	18 unit	53%	
			Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	-	20 jenis	10 jenis	50%	20 jenis	30 jenis	150%	

			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 unit	200%	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	150 kali	-	100 kali	25 kali	25%	110 kali	135 kali	90%	
			Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	-	12 paket	12 paket	33%	12 paket	24 paket	200%	
			Program peningkatan profesionalisme aparatur	PNS berkinerja baik									
			Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	-	2 jenis	1 jenis	50%	2 jenis	3 jenis	150%	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	60 set	-	52 set	-	60 set	60 set	60 set	100%	

				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu								
				Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Disusun	7 Dokumen		1 Tahun	100%		7 dokumen	100%	
				Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi yg dihasilkan								
				Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	10 kali	-	1 kali	0	-	2 kali	2 kali	20%
				Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	133%

			Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina								
			Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	-	3 desa	3 desa	100%	3 desa	6 desa	200%
			Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	0	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	100%
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	0	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	100%

				fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	-	215 org	0	-	215 org	215 org	100%	
--	--	--	--	------------------------------	--	---------	---	---------	---	---	---------	---------	------	--

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	INDIKATOR	TARET SPM/IKK/STAN- DAR NASIONAL/INT- ERNATIONAL	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
	Tujuan											
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan		75%	80%	85%	90%	-	-	85%	90%	100%	
2	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
3	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
	Sasaran											
4	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu		60%	87%	90%	93%	-	-	90%	93%	100%	
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
6	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	

7	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
8	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai		85%	87%	89%	90%	100%		89%	90%	100%	
9	LPM Aktif		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Kecamatan Lalabata dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor- faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Kecamatan Lalabata dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pelayanan masyarakat. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang masih belum optimal .
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Kecamatan Lalabata, lingkup SKPD dan pada lingkup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Kantor Kecamatan Lalabata dan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap dan menyeluruh.
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna dan memiliki kompetensi yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang dan melakukan evaluasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	soppeng	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan	90%	14.400.000	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	soppeng	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	14.400.000	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	14.400.000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	14.400.000	
	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	326.494.090	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	326.494.090	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	152.667.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	152.667.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor	unit 170m2	59.560.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor	unit 170m2	59.560.000	

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 1 unit, roda 2 = 1 unit	91.297.090	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 1 unit, roda 2 = 1 unit	91.297.090
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	22.970.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	22.970.000
Program pelayanan perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	859.461.899	Program pelayanan perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	859.461.899
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	72.592.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	67.592.800
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 1 unit, roda 2 = 1 unit	1.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 1 unit, roda 2 = 1 unit	1.000.000
Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	24.822.200	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	24.822.200
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	2.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	2.500.000

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	8.680.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	8.680.000
Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	150.618.720	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	150.618.720
Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	599.248.179	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	604.248.179
Program peningkatan profesionalisme aparatur	PNS berkinerja baik	100%	23.528.000	Program peningkatan profesionalisme aparatur	PNS berkinerja baik	100%	23.528.000
Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	2 ASN	23.528.000	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	2 ASN	23.528.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	49.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	49.000.000
Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	7 dokumen	49.000.000	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	7 dokumen	49.000.000

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Jumlah rekomendasi yg dihasilkan	100%	62.110.000	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Jumlah rekomendasi yg dihasilkan	100%	62.110.000	
Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	
Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	12.110.000	Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	12.110.000	
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina	100%	1.011.400.000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina	100%	1.011.400.000	
Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	6.700.000	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	6.700.000	

Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	543.600.000	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	543.600.000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	252.600.000	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	252.600.000
fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	193.500.000	fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	193.500.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	1 Tahun	15.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	1 Tahun	15.000.000
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	100%	2.181.694.791	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	100%	2.181.694.791
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	5 paket	1.484.961.745	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	7 paket	1.484.961.745

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman	Jumlah sarana prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	2 Paket	648.528.022	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman	Jumlah sarana prasarana pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	7 paket	648.528.022
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasana ling'kngan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	1 Paket	48.205.024	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasana ling'kngan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	1 Paket	48.205.024
			4.528.088.780				4.528.088.780

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001

2.5 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng mengacu pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2019. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Indikator Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Lalabata bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator kinerja;

Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator kinerja;

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Indikator kinerja;

Persentase kelembagaan masyarakat dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja;

Persentasasarana dan prasarana dalam kondisi baik

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Indikator kinerja;

Persentase ASN yang berkinerja baik

6. Program Pelayanan Perkantoran

Indikator kinerja;

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja;

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lalabata adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lalabata.

3.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Kantor Kecamatan Lalabata adalah diwilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

3.4 Pagu Sebelum Perubahan dan Pagu Setelah Perubahan

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Lalabata. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3.5 Sumber Dana

Sumber Dana Kantor Kecamatan Lalabata dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Soppeng

SKPD : KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
KANTOR KEC. LALABATA											
4	04	06	01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	281,957,099.00	337,858,099.00	100%	364,199,720.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Lalabata	12 kali	26,760,000.00	26,761,879.00	12 kali	24,760,000.00
20	09	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Kec. Lalabata	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	1,000,000.00	1,000,000.00	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	1,000,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Kec. Lalabata	2 Org 13 jenis	13,575,000.00	13,575,000.00	2 Org 13 jenis	13,575,000.00
20	09	01	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	Kec. Lalabata	6 jenis	2,500,000.00	3,400,000.00	6 jenis	2,500,000.00

20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kec. Lalabata	12 Kali	2,040,000.00	2,040,000.00	12 Kali	2,040,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Kec. Lalabata	Kali/tahun	80,324,720.00	120,324,720.00	Kali/tahun	120,324,720.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kec. Lalabata	17 Paket	155,757,379.00	170,756,500.00	17 Paket	200,000,000.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	157,098,890.00	307,098,890.00	100%	138,520,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kec. Lalabata	5 Unit 1 Paket	48,416,000.00	203,416,000.00	15 Unit	60,000,000.00
25	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Lalabata	1 Bangunan Kantor	36,100,000.00	36,100,000.00	1 Bangunan Kantor	5,100,000.00
25	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec. Lalabata	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	69,162,890.00	64,162,890.00	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	70,000,000.00
26	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Lalabata	10 Unit	3,420,000.00	3,420,000.00	10 Unit	3,420,000.00
20	09	03		Program Peningkatan Kapasitas Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik	Kec. Lalabata	100%	23,528,000.00	86,739,000.00	100%	11,000,000.00
0	00	03	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek	Kec. Lalabata	4 ASN	23,528,000.00	86,739,000.00	8 ASN	11,000,000.00
04	00	27		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan		87%	14,400,000.00	14,400,000.00	87%	14,400,000.00
04	00	27	01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	Kec. Lalabata	150 buah	14,400,000.00	14,400,000.00	150 buah	14,400,000.00
04	00	28		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan		2 jenis	62,110,000.00	72,110,000.00	2 jenis	62,110,000.00

04	00	28	01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kec. Lalabata	2 kali	50,000,000.00	60,000,000.00	2 kali	50,000,000.00
04	00	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Kec. Lalabata	12 kali	12,110,000.00	12,110,000.00	12 kali	12,110,000.00
04	00	29		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina		100%	1,011,400,000.00	1,112,050,000.00	100%	1,437,100,000.00
04	00	29	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Lalabata	3 desa/tahun	6,700,000.00	6,700,000.00	3 desa/tahun	6,700,000.00
04	00	29	02	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid Kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid, dan pendeta yang diberi insentif	Kec. Lalabata	272 orang	543,600,000.00	584,400,000.00	272 orang	718,200,000.00
04	00	29	03	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan	Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif	Kec. Lalabata	191 Orang	252,600,000.00	280,200,000.00	191 Orang	367,200,000.00
04	00	29	03	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	Kec. Lalabata	215 Orang	193,500,000.00	225,750,000.00	215 Orang	330,000,000.00
04	00	29	4	Kecamatan Sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat	Kec. Lalabata	2 Kali	15,000,000.00	15,000,000.00	2 Kali	15,000,000.00
				Jumlah Belanja Langsung				1,550,493,989	1,930,255,989		2,027,329,720
				KELURAHAN OMPO							
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	81,603,800.00	81,603,800.00	100%	59,760,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Ompo	12 bulan	7,020,000.00	7,020,000.00	12 bulan	6,120,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Kel. Ompo	7 jenis	713,500.00	713,500.00	7 jenis	602,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Ompo	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	1 tahun	1,020,000.00

20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Ompo	1 tahun	7,950,000.00	7,950,000.00	1 tahun	12,300,000.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Ompo	1 tahun	64,900,300.00	64,900,300.00	1 tahun	39,718,000.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	24,846,200.00	46,846,200.00	100%	28,690,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Ompo	2 paket	15,600,000.00	37,600,000.00	2 paket	14,490,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Ompo	40 M2	3,400,000.00	3,400,000.00	40 M2	3,400,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Ompo	1 tahun	2,976,200.00	2,976,200.00	1 tahun	8,380,000.00
24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Ompo	3 jenis	2,870,000.00	2,870,000.00	3 jenis	2,420,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	7,000,000.00
0	00	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Ompo	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	247,344,976.00	295,550,000.00	100%	378,145,848.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan peeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Ompo	1 Paket	247,344,976.00	247,344,976.00	1 Paket	378,145,848.00
0	00	04	4	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Ompo	5 Paket	0.00	48,205,024.00	5 Paket	40,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung								360,794,976	431,000,000		466,595,848

KELURAHAN BOTTO											
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	77,555,000.00	77,555,000.00	100%	55,555,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Botto	12 bulan	2,640,000.00	2,640,000.00	12 bulan	2,640,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Botto	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	12 kali	1,020,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Botto	1 tahun	11,770,000.00	10,270,000.00	1 tahun	11,770,000.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Botto	1 tahun	62,125,000.00	63,625,000.00	1 tahun	40,125,000.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	28,895,000.00	50,895,000.00	100%	32,895,000.00
21	09	02	09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Botto	3 unit/buah	17,305,000.00	39,305,000.00	2 unit/buah	17,305,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Botto	3 unit	4,620,000.00	4,620,000.00	3 unit	4,250,000.00
22	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Botto	4 unit	2,720,000.00	2,720,000.00	4 unit	8,620,000.00
23	09	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor dan halaman yang dipelihara	Kel. Botto	50 M2, 100 M2	4,250,000.00	4,250,000.00	50 M2, 100 M2	2,720,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	7,000,000.00
0	00	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Botto	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00

0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	290,611,933.00	290,611,933.00	100%	378,145,848.00	
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan peeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Botto	1 Paket	290,611,933.00	290,611,933.00	1 Paket	378,145,848.00	
				Jumlah Belanja Langsung					404,061,933.00	426,061,933.00		466,595,848.00
				KELURAHAN BILA								
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	84,870,000.00	87,595,000.00	100%	86,776,000.00	
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Bila	12 bulan	7,560,800.00	9,485,800.00	12 bulan	8,760,800.00	
20	09	01	08	peyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Kel. Bila	1 tahun	4,636,700.00	4,636,700.00	2 jenis	4,636,700.00	
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Bila	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	12 kali	1,020,000.00	
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Bila	1 tahun	11,258,500.00	9,408,500.00	1 tahun	12,916,500.00	
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Bila	1 tahun	60,394,000.00	63,044,000.00	1 tahun	59,442,000.00	
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	22,330,000.00	43,530,000.00	100%	26,224,000.00	
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kel. Bila	2 unit	13,555,000.00	35,555,000.00	2 jenis	17,029,000.00	
22	09	02	09	pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	luas gedung kantor yang di pelihara	Kel. Bila	40 M2	1,275,000.00	0.00	30 M2	1,275,000.00	

			15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Bila	3 unit	3,080,000.00	2,280,000.00	3 unit	3,080,000.00
			15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Kel. Bila	3 unit	4,420,000.00	5,695,000.00	3 unit	4,840,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	7,000,000.00
22	09	02	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Bila	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	337,936,330.00	337,936,330.00	100%	440,000,000.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Bila	1 Paket	337,936,330.00	337,936,330.00	1 Paket	440,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung								452,136,330.00	476,061,330.00		553,000,000.00
KELURAHAN LAPAJUNG											
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	79,066,000.00	79,066,000.00	100%	80,658,800.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lapajung	12 bulan	9,924,000.00	9,924,000.00	1 tahun	10,380,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Kel. Lapajung	1 tahun	867,000.00	867,000.00	5 jenis	713,500.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Lapajung	1 tahun	1,050,000.00	1,050,000.00	12 kali	900,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Lapajung	1 tahun	7,547,500.00	7,547,500.00	1 tahun	8,238,000.00
21	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lapajung	1 tahun	59,677,500.00	59,677,500.00	1 tahun	60,427,300.00

20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	27,384,000.00	49,384,000.00	100%	32,341,200.00
21	09	02	10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kel. Lapajung	12 buah	19,821,000.00	41,821,000.00	5 buah	23,800,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Lapajung	48 M2	3,315,000.00	3,315,000.00	48 M2	3,825,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lapajung	1 tahun	2,328,000.00	2,328,000.00	1 tahun	1,500,000.00
20	09	03	01	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Kel. Lapajung	12 psg	1,920,000.00	1,920,000.00	12 psg	3,216,200.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	7,000,000.00
0	00	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Lapajung	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	314,649,132.00	314,649,132.00	100%	500,000,000.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan peeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lapajung	1 Paket	314,649,132.00	314,649,132.00	1 Paket	500,000,000.00
				Jumlah Belanja Langsung				428,099,132.00	450,099,132.00		613,000,000.00
				KELURAHAN SALOKARAJA							
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	85,875,000.00	94,715,000.00	100%	88,890,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Salokaraja	12 bulan	8,200,000.00	2,500,000.00	12 bulan	3,600,000.00

20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Kel. Salokaraja	1 tahun	1,000,000.00	1,000,000.00	7 jenis	4,000,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Salokaraja	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	12 kali	1,050,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Salokaraja	1 tahun	7,700,000.00	13,357,000.00	1 tahun	10,797,500.00
21	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Salokaraja	1 tahun	67,955,000.00	76,838,000.00	1 tahun	69,442,500.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	20,575,000.00	40,735,000.00	100%	35,255,000.00
22	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Salokaraja	5 unit	12,200,000.00	32,360,000.00	3 jenis	19,600,000.00
23	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Salokaraja	43 M2	3,655,000.00	3,655,000.00	43 M2	3,655,000.00
22	09	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Salokaraja	3 unit	2,220,000.00	2,220,000.00	3 unit	9,500,000.00
23	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Salokaraja	3 unit	2,500,000.00	2,500,000.00	3 unit	2,500,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	0.00	100%	7,000,000.00
0	00	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Salokaraja	1 dok	7,000,000.00	0.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	271,382,174.00	271,382,174.00	100%	565,021,468.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Salokaraja	1 Paket	271,382,174.00	271,382,174.00	1 Paket	565,021,468.00

Jumlah Belanja Langsung							384,832,174.00	406,832,174.00		689,166,468.00	
				KELURAHAN LALABATA RILAU							
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	81,920,000.00	81,920,000.00	100%	87,768,000
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lbt. Rilau	12 bulan	5,148,000.00	4,548,000.00	1 Tahun	5,148,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Kel. Lbt. Rilau	1 tahun	4,030,000.00	4,030,000.00	5 jenis	4,030,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Lbt. Rilau	1 tahun	490,000.00	500,000.00	12 kali	490,000.00
21	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Lbt. Rilau	1 tahun	8,788,000.00	7,798,100.00	70 kali	8,100,000.00
22	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lbt. Rilau	1 tahun	63,464,000.00	65,043,900.00	9 paket	70,000,000.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	23,530,000.00	45,530,000.00	100%	23,530,000
23	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Lbt. Rilau	3 unit	13,600,000.00	35,600,000.00	2 jenis	13,600,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Lbt. Rilau	51 M2	5,100,000.00	5,100,000.00	51 M2	5,100,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lbt. Rilau	3 unit	4,110,000.00	4,110,000.00	3 unit	4,110,000.00
23	09	02	15	pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Kel. Lbt. Rilau	2 unit	720,000.00	720,000.00	2 unit	720,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	7,000,000.00

0	00	04	09	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Lbt. Rilau	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	378,145,848.00	378,145,848.00	100%	409,288,469.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lbt. Rilau	1 Paket	378,145,848.00	378,145,848.00	1 Paket	409,288,469.00
				Jumlah Belanja Langsung				490,595,848	512,595,848		527,586,469
				KELURAHAN LEMBA							
20	09	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	84,615,000.00	92,015,000.00	100%	83,045,000
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lemba	12 bulan	5,340,000.00	8,840,000.00	12 bulan	10,440,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Kel. Lemba	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	12 kali	1,050,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Lemba	1 tahun	15,280,000.00	16,280,000.00	1 tahun	12,210,000.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lemba	1 tahun	62,975,000.00	65,875,000.00	1 tahun	59,345,000.00
20	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		100%	21,835,000.00	43,435,000.00	100%	29,955,000.00
23	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Lemba	1 unit	12,170,000.00	33,770,000.00	1 unit	23,110,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Lemba	47 M2	3,995,000.00	3,995,000.00	47 M2	2,475,000.00

23	09	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lemba	4 unit	2,800,000.00	2,800,000.00	4 unit	2,000,000.00
24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Lemba	3 unit	2,870,000.00	2,870,000.00	3 unit	2,370,000.00
0	00	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan sistem pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	7,000,000.00	0.00	100%	7,000,000.00
0	00	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Kel. Lemba	1 dok	7,000,000.00	0.00	1 dok	7,000,000.00
0	00	30		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kewenangan yang terlaksana		100%	295,419,374.00	295,419,374.00	100%	921,392,316.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan peeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lbt. Rilau	1 Paket	295,419,374.00	295,419,374.00	1 Paket	921,392,316.00
Jumlah Belanja Langsung								408,869,374	430,869,374		1,041,392,316
Jumlah Belanja Langsung Kecamatan Lalabata								4,479,883,756	5,063,775,780		6,384,666,669

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si
NIP. 19791102 199810 2 001

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan

Dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Lalabata Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021. Selain itu RENJA PERUBAHAN juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA PERUBAHAN sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA PERUBAHAN Kecamatan Lalabata Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaransasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA PERUBAHAN Kecamatan Lalabata tahun 2019, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu

- melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. .
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
 3. penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Tahun 2019 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja Perubahan masih belum sepaham.
 4. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lalabata Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
 5. Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Soppeng dan Renstra Kecamatan).
 6. RENJA PERUBAHAN Kecamatan Lalabata Tahun 2019, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau

pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
- d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- e. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- f. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- g. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

- h. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- i. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Watansoppeng, Agustus 2019

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001